

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. LANDASAN LEORI

1. Teori Stewardship

Teori stewardship merupakan bagian dari agensi teori yang menjadikan *grand theory* dalam penelitian ini. Sangat tepat untuk penelitian ini menggunakan teori stewardship, karena teori stewardship dapat menggambarkan keadaan di mana manajer kurang diyakinkan oleh tujuan individu seperti materi dan uang tetapi lebih berpusat pada tujuan hasil mendasar mereka, khususnya untuk kepentingan melayani organisasi (Raharjo, 2007).

Pemerintah sebagai pihak yang memiliki banyak data informasi dan bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat. Maka dari itu pemerintah harus memiliki kesadaran yang akan terus mewujudkan pemerintahan transparansi dan akuntabilitas melalui pengungkapan dalam laporan keuangan secara baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam keinginan sebagai pegawai pemerintah yang patuh dalam menjalankan tujuan politik seperti mencari simpati para rakyat agar nantinya bisa terpilih dalam pemilu selanjutnya dan upaya dalam mendapat kepercayaan publik. Apabila dalam teori agensi menjelaskan hubungan antara *principal* dan *agen* maka dalam teori *stewardship* menjelaskan hubungan antara *principal* dan *steward*

Para penerima amanah (*steward*) termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan pihak pemberi amanah (*principal*), maka dari itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya karena *steward* akan berusaha untuk mencapai sasaran organisasinya. Hal itu menjadikan teori ini memiliki dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang. Dengan kata lain hubungan yang terjadi antara *principal* dan *steward* dalam hal ini rakyat sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai *steward*, ialah hubungan yang terjalin karena adanya sifat dasar manusia yang dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, dan kejujuran terhadap pihak lain (Sari, 2007).

2. Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sesuai (Lesmana, 2010) laporan keuangan sebagai jenis tanggung jawab publik untuk memahami kondisi umum kegiatan operasional, posisi moneter, pendapatan dan klarifikasi hal - hal yang terkandung dalam ringkasan anggaran di laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan ini untuk keterusterangan, khususnya memberikan data informasi keuangan yang jelas dan terbuka kepada publik mengingat bahwa masyarakat umum memiliki hak untuk mengetahui secara transparan dan lengkap kewajiban otoritas publik dalam menangani aset yang dibagi dengannya dan konsistensinya dengan peraturan dan pedoman.

Sebagaimana ditunjukkan oleh (Setyaningrum dan Syafitri, 2012), ada empat motivasi dibalik perincian laporan keuangan, yaitu tanggung jawab khusus, manajemen, keterusterangan atau transparansi, dan keseimbangan

usia. Pengungkapan ini memiliki arti penting untuk tidak menutupi dan tidak menyembunyikan. Dengan asumsi terkait dengan laporan keuangan, pengungkapan menyiratkan bahwa laporan keuangan harus memberikan data dan klasifikasi yang memuaskan mengenai konsekuensi dari pelaksanaan unit khusus (Khasanah dan Rahardjo, 2014).

Pengungkapan data yang tepat, baik informasi kuantitatif maupun subjektif, harus ditekankan pada data material dan signifikan yang dapat dimanfaatkan secara terarah. Pengungkapan harus memiliki pilihan untuk meningkatkan nilai data dan tidak menguranginya dengan data yang terlalu pasti dan menentang untuk diteliti. Pemerintah daerah diharapkan untuk memperkenalkan dan mengungkapkan pengungkapan yang diperlukan yang merupakan komponen pembukuan di LKPD sesuai norma yang sesuai, khususnya SAP (Lesmana, 2010).

3. Kekayaan Daerah

Derajat keberhasilan suatu daerah dapat digambarkan dari kekayaan daerah tersebut (Sinaga, 2011 dalam Syafitri, 2012). Mengingat PP No.71 Tahun 2010 Kekayaan daerah dapat didapatkan dengan jumlah aset dikurangi jumlah kewajiban. Semakin banyak kekayaan daerah maka semakin banyak pula tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Semakin besar kekayaan daerah, semakin penting aset yang mereka perlu ungkapkan sehingga peningkatan kekayaan daerah dapat membangun tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan. Mengingat teori *stewardship*, pemerintah berusaha untuk menunjukkan

tanggung jawab atas pameran besar mereka melalui konsekuensi dari kekayaan besar dan banyak aset dengan tujuan bahwa mereka berusaha untuk mengungkapkannya lebih baik dalam laporan keuangan mereka.

4. Ukuran Legislatif

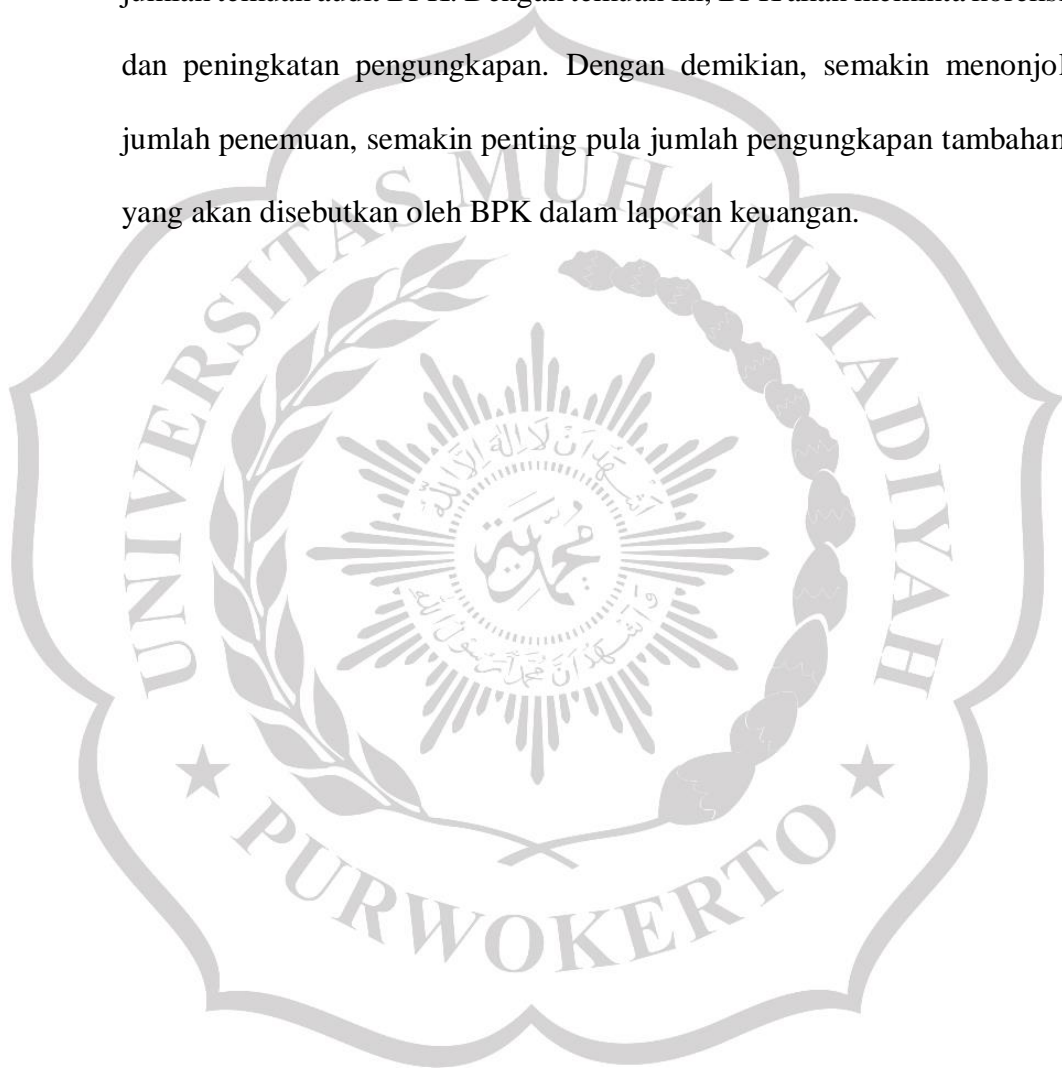
Winarni & Murni (2007) mengungkapkan bahwa DPRD merupakan lembaga yang berperan penting dalam mengendalikan kebijakan keuangan suatu daerah. DPRD sebagai badan pengatur mempunyai tugas untuk mengarahkan dana daerah agar DPRD dapat menangani rencana keuangan dengan sebaik – baiknya, sehingga rencana pengeluaran dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Banyaknya jumlah anggota DPRD seharusnya dapat memperluas pengawasan terhadap pemerintah di sekitarnya sehingga berdampak pada tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil dari banyaknya jumlah legislatif adalah pemerintah daerah akan lebih mampu dalam mengungkap data pembukuan sesuai dengan SAP (Sertyaningrum dan Syafitri, 2012).

5. Temuan Audit

Temuan audit menurut (Hendriyani & Tahar, 2015) merupakan kasus dalam rekapitulasi fiskal yang ditemukan oleh BPK bertentangan dengan pelaksanaan laporan dan identifikasi sebagai pelanggaran. Temuan audit mungkin menunjukkan penolakan dengan tindakan tinjauan atau memiliki ruang untuk pengembangan.

Seperti yang ditunjukkan oleh (Khasanah dan Rahardjo, 2014) temuan audit adalah kasus yang dibedakan oleh BPK dengan laporan

keuangan pemerintah daerah untuk pelanggaran yang dilakukan oleh suatu daerah terhadap pengaturan kontrol intern atau peraturan yang sesuai. Penelitian (Liestiani, 2008) menemukan bahwa tingkat pengungkapan pemerintah daerah kabupaten/kota dipengaruhi positif dan signifikan oleh jumlah temuan audit BPK. Dengan temuan ini, BPK akan meminta koreksi dan peningkatan pengungkapan. Dengan demikian, semakin menonjol jumlah penemuan, semakin penting pula jumlah pengungkapan tambahan yang akan disebutkan oleh BPK dalam laporan keuangan.



B. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	VARIABEL YANG DIGUNAKAN	HASIL
1.	Nur Khasanah & Shiddiq Nur Raharjo <i>Vol. 3 No. 3 Tahun 2014</i>	Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas dan Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Daerah	X: Karakteristik (Kekayaan Daerah) dan Temuan Audit Y: Tingkat Pengungkapan LKPD	- Tingkat pengungkapan LKPD dipengaruhi positif signifikan oleh total aset. - Jumlah dideferensiasi berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. - Tingkat pengungkapan LKPD dipengaruhi tidak signifikan oleh kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, ukuran legislatif dan temuan audit.
2.	Candra Maulana & Bestari Dwi Handayani <i>Accounting Analysis Journal 4(4) (2015).</i>	Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas Pemerintahan dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Lkpd	X: Kompleksitas Pemerintahan (Ukuran Legislatif) dan Temuan Audit Y: Tingkat Pengungkapan Wajib Lkpd	- Tingkat pengungkapan LKPD dipengaruhi positif oleh ukuran pemerintah daerah dan ukuran legislatif.

	ISSN 2252-6765			<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pengungkapan LKPD dipengaruhi negatif oleh intergovernmental revenue. - Tingkat pengungkapan LKPD tidak dipengaruhi oleh kemandirian daerah, jumlah SKPD dan temuan audit.
3.	Ghaniyyu Mintotik Waliyyan & Amir Mahmud <i>Accounting Analysis Journal 4 (2) (2015)</i> ISSN 2252-6765	Pengaruh Karakteristik Pemerintah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia	X : Karakteristik (Temuan Audit) Y : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pengungkapan LKPD dipengaruhi positif oleh umur pemerintah daerah. - Tingkat pengungkapan LKPD tidak dipengaruhi oleh size, temuan audit, leverage dan Intergovernmental revenue.
4.	Akhmad Priharjanto dan Yusniar Yuliana Wardani <i>Vol.1(2016) Edisi Januari</i>	Pengaruh Temuan Audit, Tingkat Penyimpangan, Opini Audit dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia	X: temuan audit, Karakteristik(Kekayaan Daerah) Y: tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pengungkapan LKPD tidak dipengaruhi signifikan oleh temuan audit.

5.	<p>Meli Marliani, Moh. Amin & M. Cholid Mawardi</p> <p><i>Vol. 07 No. 10 Agustus 2018</i></p>	<p>Pengaruh Karakteristik Pemerintah, Kompleksitas dan Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p>	<p>X: Karakteristik (Kekayaan Daerah), Ukuran Legislatif dan Temuan Audit. Y: Tingkat Pengungkapan Lkpd.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pengungkapan LKPD dipengaruhi signifikan oleh kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, total aset, umur pemerintah daerah, jumlah SKPD, ukuran legislatif dan temuan audit. - Tingkat pengungkapan LKPD dipengaruhi tidak signifikan oleh kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, umur pemerintah daerah, jumlah SKPD dan temuan audit. - Tingkat pengungkapan LKPD dipengaruhi positif oleh total aset. - Tingkat pengungkapan LKPD dipengaruhi negatif signifikan oleh ukuran legislatif.
6.	<p>Pankrasius T. Suryadi</p> <p><i>Jurnal Ekobis</i></p>	<p>Pengaruh Kekayaan Daerah (PAD), Total Aset, Jumlah Penduduk, Tingkat</p>	<p>X : Kekayaan Daerah dan Temuan Audit</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pengungkapan LKPD secara

	<i>Dewantara</i> <i>Vol. 1 No.1</i> <i>Januari</i> <i>2018</i>	Ketertanggung, dan Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi LKPD pada Provinsi Jawa Tengah Periode 2014 - 2016)	Y : Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	simultan dipengaruhi positif oleh kekayaan daerah, jumlah aset, jumlah penduduk, tingkat ketergantungan dan temuan audit.
7.	A.Salfadhilah, M.Sumardjo, S.Y. <i>Wijaya</i> <i>Jurnal</i> <i>Akunida</i> ISSN 2442-3033 Volume 7 Nomor 1, Juni 2021	Pengaruh Karakteristik Daerah dan Opini Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	X: Karakteristik (Kekayaan Daerah) Y: Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	- Tingkat pengungkapan LKPD dipengaruhi negatif signifikan oleh kekayaan daerah. - Tingkat pengungkapan LKPD tidak dipengaruhi signifikan oleh ketergantungan daerah. - Tingkat pengungkapan LKPD dipengaruhi positif signifikan oleh total aset dan opini audit.
8.	M Ridwan, & M Rizal Yahya <i>Jurnal</i> <i>Ilmiah</i> <i>Mahasiswa</i> <i>Ekonomi</i> <i>Akuntansi</i> <i>(JIMEKA)</i>	Pengaruh Tingkat Ketertanggung Daerah, Temuan Audit BPK, Jumlah SKPD, dan Ukuran Legislatif Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	X : Temuan Audit, Dan Ukuran Legislatif Y : Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan	- Tingkat pengungkapan LKPD dipengaruhi positif oleh tingkat ketergantungan dan jumlah SKPD. - Tingkat pengungkapan

	<i>Vol. 5, No. 3, (2020) Halaman 429-437 E- ISSN 2581-1002</i>		Pemerintah Daerah	LKPD dipengaruhi negatif oleh temuan audit dan ukuran legislatif.
9.	Fikrinah Naopal, Sri Rahayu & Siska Priyandani Yudowati ASSETS, Volume 7, Nomor 1, Juni 2017: 56-68	Pengaruh Karakteristik Daerah, Jumlah Penduduk, Temuan Audit, dan Opini Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	X : Temuan Audita Y : Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	- Tingkat pengungkapan LKPD dipengaruhi secara simultan oleh karakteristik daerah, jumlah penduduk, temuan audit dan opini audit. - Tingkat pengungkapan LKPD dipengaruhi positif oleh umur pemerintahan dan temuan audit. - Tingkat pengungkapan LKPD secara Persia tidak dipengaruhi oleh ukuran pemerintah, jumlah penduduk dan temuan audit.
10.	Henny Agnecia Uliarta Simbolon & Christophorus Heni Kurniawan	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan	X : Karakteristik (Ukuran Legislatif dan Kekayaan Daerah) Y : Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan	- Tingkat pengungkapan laporan keuangan dipengaruhi positif oleh ukuran pemerintah daerah.

	<p><i>MODUS</i> <i>Vol. 30 (1):</i> <i>54-70 ISSN</i> <i>0852-1875 /</i> <i>ISSN</i> <i>(Online)</i> <i>2549-3787</i></p>	<p>Di Seluruh Provinsi Indonesia</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pengungkapan laporan keuangan dipengaruhi negatif oleh pendapatan antar pemerintah dan rasio independen keuangan. - Tingkat pengungkapan LKPD tidak dipengaruhi oleh ukuran legislatif, kekayaan pemerintah daerah, usia administrasi, diferensiasi fungsional dan spesialisasi pekerjaan.
11.	<p>M. Zahrul Fuadi & Jhon Andra Asmara <i>Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)</i> <i>Vol. 5, No. 1,</i> <i>(2020)</i> <i>Halaman</i> <i>96-106 E-</i> <i>ISSN 2581-</i> <i>1002</i></p>	<p>Pengaruh Ukurann Pemerintah Daerah, Kemandirian Daerah, Penerimaan Dari Pemerintah Pusat, Ukuran Legislatif, Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Aceh)</p>	<p>X : Ukuran Legislatif dann Temuan Audit Y : Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pengungkapan LKPD dipengaruhi positif oleh ukuran pemerintah daerah, kemandirian daerah, pendapatan antar pemerintah, tindakan legislatif dan temuan audit. - Tingkat pengungkapan LKPD dipengaruhi

				<p>negatif oleh penerimaan antar pemerintah dan temuan audit.</p> <p>- Tingkat pengungkapan LKPD tidak dipengaruhi signifikan oleh ukuran pemerintah daerah, independensi daerah dan tindakan legislatif.</p>
--	--	--	--	---

C. Kerangka Pemikiran

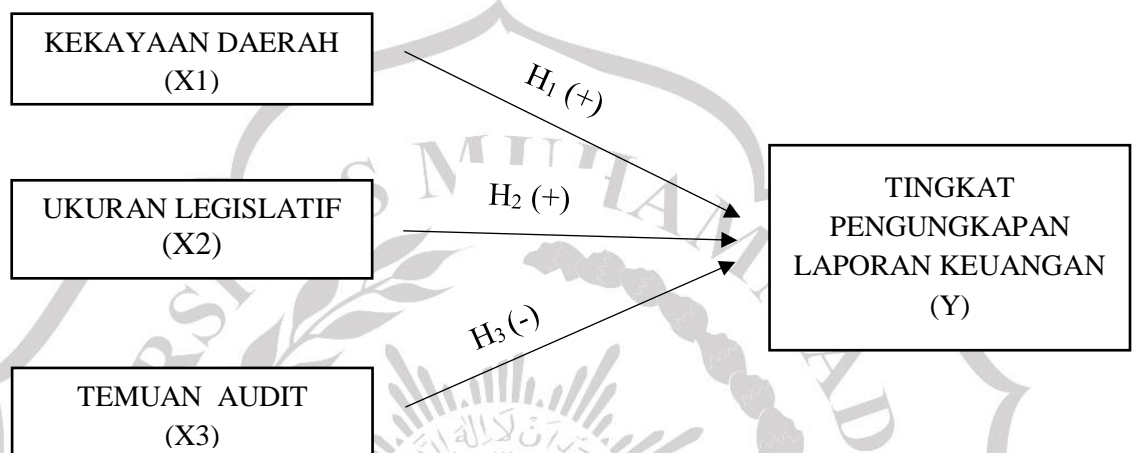
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor bebas seperti kekayaan daerah, ukuran legislatif dan temuan audit terhadap variabel terikat, khususnya tingkat pengungkapan laporan keuangan. Laporan keuangan berkualitas tinggi sangat penting untuk semua entitas, termasuk pemerintahan daerah. Studi ini akan mengukur tingkat konsistensi dari pemerintah daerah dalam membuat pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Variabel terikat yang digunakan untuk keadaan ini ialah tingkat pengungkapan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dari Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) ditinjau dari Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah daerah yang merencanakan laporan keuangan dengan tepat sesuai standar pembukuan pemerintah akan mensurvei

para pegawai pemerintah daerah yang bekerja dengan baik. Laporan keuangan yang berkualitas akan memudahkan pembaca untuk memahami yang terkandung dalam laporan keuangan.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1



D. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Kekayaan Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Seperti yang ditunjukkan oleh (Sinaga, 2011) kekayaan suatu daerah adalah sejauh mana tingkat bantuan pemerintah suatu daerah. Kekayaan daerah juga menjadi pertimbangan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Syafitri (2012), kekayaan pemerintah daerah jelas terkait dengan pengungkapan yang diperluas karena membuat gerakan tentang sifat kepala daerah, di mana kepala daerah dapat membantu dengan memperluas kemungkinan mereka untuk diangkat kembali dan mengurangi biaya kepentingan. Demikian pula dari akibat yang diarahkan oleh Liestiani (2008) bahwa tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah

dipengaruhi positif oleh kekayaan daerah. Semakin penting kekayaan daerah, semakin penting aset yang harus mereka ungkapkan sehingga kekayaan daerah yang melimpah dapat membangun tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan.

H₁ : Kekayaan Daerah berpengaruh Positif terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemda.

2. Pengaruh Ukuran Legislatif terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Sesuai (WinarnaodanoMurni,o2007) ukuran legislatif atau DPRD merupakan yayasan yang memiliki potensi dan tugas pokok dalam pengelolaan dana provinsi. Menurut Setyaningrum dan Syafitri (2012) dewan atau DPRD adalah lembaga yang menangani daerah dan memiliki kemampuan untuk mengatur kewenangan publik sehingga secara konsisten tepat untuk mencapai tujuan daerah dan menilai pelaksanaan urusan pemerintahan terdekat. dan selanjutnya mengawasi perincian terkait dengan data keuangan pemerintah daerah untuk membuat pemerintahan yang sederhana. Tugas DPRD sebagai bos moneter berjalan dengan baik dengan tujuan memiliki kendali atas strategi keuangan daerah secara finansial, produktif, sukses, lugas, dan akuntabel (Winarna dan Murni, 2007). Semakin diperhatikan jumlah individu dari majelis, wajar jika semakin diperhatikan tingkat pengawasan yang dilakukan oleh individu dari badan pembuat undang-undang tersebut.

Menurut penelitian (Syafitri, 2012) dan (Yulianingtyas, 2011) menemukan bahwa tingkat pengungkapan laporan keuangan dipengaruhi

positif oleh jumlah anggota legislatif atau DPRD. Dari uraian tersebut, makahipotesis untuk penelitian ini adalah:

H 2 : Ukuran Legislatif berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3. Pengaruh Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penemuan pemeriksaan BPK adalah kasus yang ditemukan oleh BPK dalam laporan keuangan pemerintah lingkungan untuk pelanggaran yang dilakukan oleh kabupaten terhadap kontrol interior dan pengaturan peraturan dan pedoman yang relevan. Dengan temuan ini, BPK akan meminta koneksi dan menggarap pamerannya. Dengan cara ini, semakin menonjol jumlah penemuan, semakin penting jumlah tambahan yang akan disebutkan oleh BPK dalam laporan anggaran. Penelitian Liestiani (2008) mengamati bahwa jumlah temuan review secara pasti dan mendasar terkait dengan tingkat terakhir Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pernyataan ini juga didukung oleh penelitian dari (M Ridwan dan M Rizal Yahya, 2020) yang menemukan bahwa temuan audit mempengaruhi tingkat laporan ringkasan fiskal. Mengingat hipotesis dan beberapa hasil pemeriksaan masa lalu mengenai dampak temuan audit pada tingkat pengungkapan LKPD, maka dapat diajukan spekulasi sebagai berikut:

H₃ : Temuan Audit berpengaruh Negatif terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah